



## Peran Kpu Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak

(Studi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019)

Indra Lesang<sup>1</sup>, Rumaila Daiyan<sup>2</sup>

Universitas Pasifik

---

### Abstract

Received: 22 Desember 2022

Revised: 24 Desember 2022

Accepted: 26 Desember 2022

Political participation in a democratic country is an indicator of the implementation of the highest legitimate administration of state power by the people which is manifested by their involvement in democratic parties. The higher the level of political participation indicates that the people follow and understand and are involved in state activities. Conversely, a low level of political participation generally indicates that the people have little appreciation or interest in state issues or activities. The low level of people's political participation is reflected in the attitude of the white group (abstentions) in elections. For this reason, this research is focused on the role of KPU Morotai Island in increasing voter participation in the presidential and vice presidential elections. The results of the study found (1) that the KPU's role was carried out in 2 socializations, namely direct and indirect socialization. Direct socialization is carried out in 10 segments, namely direct socialization through family basis, beginner election basis, youth election basis, women election basis, disability voter base, special needs voter base, marginal voter base, community basis, religious basis, citizen base. While indirect socialization through props and mass media. (2). Community participation in Morotai Island Regency in simultaneous elections increased by 87.6%. (3) on the factors that influence there are supporting and inhibiting factors. Supporting factors see the existence of cooperation between Bawaslu organizers, KPU and Adhocks at the lower level. Then there is support from the local government. While the inhibiting factor is the existence of different interests that cause conflict

**Keywords:** Role, KPU, Participation, Voters

(\*) Corresponding Author: [indralesang03@gmail.com](mailto:indralesang03@gmail.com)

**How to Cite:** Lesang, I., & Daiyan, R. (2023). Peran KPU Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 669-680. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7628396>

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Kehendak rakyat ini mengisyaratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak demokrasi dan cara pemerintahan yang diselenggarakan (Fadjar, 2013: 1). Begitu juga dengan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Karena secara ideal tujuan pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.

Pemilu atau pesta demokrasi diselenggarakan oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan pemilihan kepala daerah di Indonesia (Firmanzah, 2010: 55).



Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota/kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk, PPS membentuk kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara.

Penyelenggara pemilihan presiden mengalami dinamisasi seiring dengan perkembangan konstitusi. Begitu juga dalam pengaturan Pemilihan Presiden. Perubahan UUD 1945 (1999-2002) salah satunya menyangkut perubahan mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial yang kita anut (Fadjar, 2013: 52).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Presiden yaitu 78,2%, sedangkan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik memilih mencapai 71,17%. Sedangkan Partisipasi memilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58% ([www.detik.com](http://www.detik.com), Fenomena-Golput-dari-Orde-Lama-hingga-Kekinian, di akses pada tanggal, 20 September 2019, jam 02.14 WIT).

Selain permasalahan di atas, di Pulau Morotai dari hasil observasi lapangan, penulis menemukan ketika Pemilu Serentak 2019 sedang berlangsung, banyak sekali pemilih kebingungan ketika harus memilih calon presiden dan wakil presiden, dikarenakan sudah dipusingkan dengan Pemilihan Calon Legislatif yang begitu banyak kandidat.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan pada 1 November 2019- 30 Januari 2020 berlokasi di Kantor Kecamatan Morotai Selatan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **Observasi**

Menurut Ridwan, Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, Proses kerja (Ridwan, 2005: 104). Dalam teknik observasi ini penulis langsung turun ke lokasi

KPU Pulau Morotai untuk melihat dan mengamati bagaimana Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

### **Dokumentasi**

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, (Sugiyono, 2010: 24).

Teknik ini peneliti gunakan untuk mempelajari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Bagaimana peran KPU Pulau Morotai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, agenda, dokumen, surat-surat kabar dan foto-foto lokasi penelitian.

### **Wawancara**

Menurut Faruk Muhammad & Djali, bahwa wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan (Muhammad & Djali, 2003: 32).

Wawancara dilakukan kepada informan yang sudah ditetapkan sebagai informan kunci (narasumber). Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran KPU Pulau Morotai**

Pemilihan presiden dan wakil presiden sejatinya menjadi sebuah sarana atau wadah untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sejak pemerintah membuat kebijakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak, maka hal ini menjadi kesempatan politik yang baik untuk seluruh masyarakat di daerah sebagai sebuah sarana menuju demokratisasi.

Di pilpres kabupaten pulau morotai sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah (Wawancara dengan Irwan Abbas, Ketua KPU, 20 November 2019). Maka dari itu perlu adanya peran dari KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilu di masyarakat.

Menurut Soekanto bahwasanya peran dapat diartikan sebagai suatu aspek dinamis yang dapat berbentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu jabatan dan melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Sebagaimana penjelasan Soekanto di atas, maka dalam hal ini peran KPU Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2019. Hal ini sejalan dengan perkataan Komisioner KPU Kabupaten Pulau Morotai, Irwan Abbas, S.Sos, menurutnya "Yang jelas di dasar pelaksanaan pemilu adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum" (wawancara dengan Irwan Abbas, Ketua KPU, 20 November 2019).

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih presiden. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, berdasarkan observasi lapangan Peran KPU Kabupaten Pulau Morotai di lakukan dalam dua hal yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

### **Sosialisasi Langsung**

Peran KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan sosialisasi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Sebagaimana yang diungkap oleh Prihatmoko, tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat (Prihatmoko, 2003: 180). Sedangkan menurut Arbi Sanit, partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan (Sanit, 1997: 7).

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara.

Dari hasil wawancara, pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya (Wawancara dengan Irwan Abbas, Devisi Perencanaan dan Data KPU 2014-2019, 20 November 2019).

Untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Pulau Morotai berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum yang mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sosialisasi langsung yang dilakukan KPU Pulau Morotai sangat maksimal dengan cara melaksanakan Program Relawan Demokrasi guna membantu proses sosialisasi pemilu.

Relawan Demokrasi merupakan program yang didirikan KPU guna membantu proses sosialisasi Pemilu. Relawan Demokrasi dibentuk berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 32/PP.08- SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Kemudian ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pulau Morotai Surat Pengumuman Nomor: 01/SDM.02-PU/8207/Kab/I/2019 tentang Pengumuman Pembentukan Relawan Demokrasi Serentak Tahun 2019.

Setelah dibentuk, Relasi ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 05/PP.05.1- Kpt/03/8207/Kab/I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Di Kabupaten Pulau Morotai Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai. Relawan Demokrasi diharapkan bisa menyampaikan informasi seputar Pemilu kepada masyarakat awam agar tingkat pemilih pada tahun ini bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan Kasubag Teknis dan Hupmas, program Relawan Demokrasi memiliki tujuan yaitu (1) meningkatkan kualitas proses pemilu di Kabupaten Pulau Morotai, (2) meningkatkan partisipasi pemilih di kabupaten pulau morotai, (3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di kabupaten pulau morotai, (4) membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi di kabupaten pulau morotai.

Materi yang disampaikan meliputi 4 hal, pertama pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi masyarakat. Kedua, tanggal, hari dan jam pemungutan suara. Ketiga, tata cara pemberian suara dalam pemilu. Keempat, pengenalan peserta pemilu (pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, DPD).

Relawan Demokrasi beranggota 55 orang terbagi kedalam 10 segmen basis. Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor: 05/PP.05.1-Kpt/03/8207/Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Relawan Demokrasi di Kabupaten Pulau Morotai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, masa kerja Relawan Demokrasi selama 3 bulan. Terhitung dari bulan february sampai bulan april 2019.

Dari hasil wawancara dengan Ketua KPU, Kasubag Teknis dan Hupmas, dalam pelaksanaannya, sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi terbagi kedalam 10 basis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet.

### **Sosialisasi di Basis Keluarga**

Dalam pemilu serentak 2019 ini, KPU Pulau Morotai merencanakan gerakan sadar pemilu. Dimana seluruh warga negara yang cinta negeri ini suda. Sosialisasi segmen berbasis keluarga di laksanakan pada tiga desa yaitu Desa Sabalah tanggal 15 April 2019, Desa Daeo tanggal 1 Maret 2019, dan Desa Juanga 3 Februari 2019. Peran dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Peserta adalah masyarakat dan stake holder terkait.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota KPU Segmen Keluarga bahwa tujuan sosialisasi ini adalah memberikan informasi tentang pentingnya Pemilu dan penggunaan hak pilih kepada keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi.

Gerakan sadar pemilu, jika kita tidak makna lebih jauh berarti juga sebuah pendekatan yang lebih persuasif, lebih menyentuh naluri dengan sebuah pengharapan warga masyarakat sadar bahwa memilih itu adalah hak konstitusi mereka. Memberikan penyadaran yang paling mudah tentu dimulai dari kelompok terkecil dan mendasar di masyarakat itu sendiri yaitu keluarga.

Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi. Bahkan ada pula ahli yang menyebutkan keluarga adalah

abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai suatu perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan terakhir.

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat melepaskan dari lingkungan keluarga.

### **Sosialisasi di basis pemilih pemula**

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau *first time voters*. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu berikutnya.

Pemilih pemula adalah mereka memiliki potensi (wawancara dengan Irwan Abbas, Ketua KPU, 20 November 2019). Pemilu pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di bangku SMA atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Bagi KPU Pulau Morotai, pemilu muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam.

Salah satu bentuk kegiatan kepada kelompok pemula adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.

Pada segmen pemilu pemula, Sosialisasi dilaksanakan pada tiga sekolah yaitu SMA Muhammadiyah 1 Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan tanggal 06 Februari 2019, SMK Negeri 1 Sangowo Kecamatan Morotai Timur tanggal 14 Februari 2019, dan MA Nurul Huda Kecamatan Morotai Selatan tanggal 13 April 2019.

### **Sosialisasi kepada basis Kepemudaan**

Pada segmen pemilih muda, sosialisasi dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan tanggal 02 Februari 2019, Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat, tanggal 23 Februari 2019, dan Desa Bobula Kecamatan Morotai Selatan Barat tanggal 4 April 2019.

Dari hasil wawancara, tujuan dari pelaksanaan ini adalah memberikan pendidikan kepada pemilih muda karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks Pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/ tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama

### **Sosialisasi kepada basis pemilih perempuan**

Dari hasil wawancara salah satu Pimpinan KPU, Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai. Bagi KPU Kabupaten Pulau Morotai pemilih perempuan tidak hanya memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya.

Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam memiliki pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang di dominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupak struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang yang sangat kuat dan kekal.

Sosialisasi segmen pemilih perempuan dilaksanakan di Desa Kenari Morotai Utara tanggal 05 Februari 2019, Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan tanggal 4 Maret 2019, dan Desa Falila Kecamatan Morotai Selatan tanggal 15 April 2019.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Relasi, basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya.

### **Sosialisasi di basis pemilih disabilitas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Bagi KPU Pulau Morotai, penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidik pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian (Wawancara dengan Irwan Abbas, Ketua KPU, 20 November 2019).

Untuk itu, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai memberikan kepastian bahwa dalam penyelenggara pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatas yang mereka/penyandang disabilitas miliki. Aksesibilitas di sini dapat diartikan sebagai layanan atau kemudahan yang disediakan untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas. Mendapatkan aksesibilitas dalam pilpres merupakan bagian hak politik dari para penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dimaksudkan untuk menjamin hak pilih mereka dapat terpenuhi pada setiap tahapan pemilihan. Sebab penyandang disabilitas seringkali mendapatkan

hambatan dalam menyalurkan aspirasinya dikarenakan kurang aksesnya sarana dan prasarana pada saat hari pemungutan suara berlangsung.

Pada segmen penyandang disabilitas, sosialisasi di pusatkan pada Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan tanggal 12 Februari 2019, di Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tanggal 7 Maret 2019 dan Desa Sambiki tanggal 15 April 2019.

#### **Sosialisasi dibasis pemilih berkebutuhan khusus**

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dari hasil wawancara, pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Perasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.

Pada segmen berkebutuhan khusus, sosialisasi dilaksanakan pada RSUD Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Tanggal 8 Februari 2019, masyarakat Desa Pangeo dan Desa Sopi tanggal 5 Maret 2019, dan Desa Morodadi pada tanggal 6 April 2019.

#### **Sosialisasi dibasis pemilih marginal**

Dari hasil wawancara kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan hak warga negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi dan berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin berkembang.

Sosialisasi segmen marginal sosialisasi dilaksanakan pada Desa Galo-Galo 2 Februari 2019, Desa Posi-Posi Rao dan Tutuhu tanggal 22-23 Februari 2019, kemudian Desa Ngele- Ngele Kecil tanggal 06 April 2019.

#### **Sosialisasi di basis komunitas**

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut, karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lainnya yang serupa.

Dari hasil wawancara, sosialisasi pada segmen komunitas dilaksanakan di kelompok nelayan Desa Wawama tanggal 31 Januari 2019, kelompok nelayan Desa Pangeo dan Sopi tanggal 5 Maret 2019, komunitas Bentor di Pasar baru Desa Gotalamo 15 April 2019.

Kegiatan sosialisasi yang di tujukan di dua komunitas itu bertujuan untuk memberikan informasi dan tahapan Pemilu kepada komunitas nelayan yang ada di desa tersebut dan Bentor.

### **Sosialisasi basis keagamaan**

Segmen agama adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Dari hasil wawancara pada segmen keagamaan, sosialisasi dilaksanakan di Desa Wewemo tanggal 03 Februari 2019, di Desa Waringin tanggal 27 Februari 2019, dan Desa Yayasan tanggal 13 April 2019..

Dari hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai, sosialisasi dilakukan setelah kegiatan ibadah. Misalnya, jika di islam, setelah ibadah sholat jumat. Jika di kriteren, menunggu setelah ibadah gereja selesai.

Selama ini informasi tentang Pemilu hanya diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi Pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja. Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah.

### **Sosialisasi di basis warganet**

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, pengguna internet indonesia saat ini mencapai 132, 7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70% dari pengguna internet indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menasar basis warganet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Atas dasar tersebut, dari hasil wawancara pada segmen warganet dilaksanakan pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019, Jumat 06 Februari 2019, Sabtu 06 April 2019, jam 08.00 WIT s/d selesai. Bertempat Daruba Kecamatan Morotai Selatan. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemilih yang aktif menggunakan sosial media. Diharapkan informasi yang mereka terima dapat dipahami, sehingga mereka menggunakan hak pilihnya.

### **Sosialisasi tidak langsung**

Dari hasil wawancara sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, melalui alat peraga. Penyebaran informasi melalui alat peraga pada saat ini masih digunakan, seperti baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker, topi, kaos. Konten atau isi bahan alat peraga tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Pesan-pesan atau gambar yang dimuat bertujuan selain untuk memberikan informasi dengan alat peraga ini nantinya ada ajakan untuk melaksanakan Pemilu serentak 2019 yang disalah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kedua, sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak langsung dilakukan melalui media massa Malut Post, dll. Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu

yang bersih, jujur, adil, transparan, dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon capres dan cawapres.

Bukan hanya itu, masyarakat Kabupaten Pulau Morotai juga bisa mengetahui jadwal dan alur pelaksanaan pilpres dan juga bisa memantau perkembangan pilpres dari mulai kampanye sampai perhitungan suara. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

### **Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai**

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih presiden dan wakil presiden. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.

Tingkat keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari tingginya tingkat Partisipasi masyarakat, hal ini terbukti pada Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Pulau Morotai tingkat partisipasi masyarakat meningkat 87,6% dari pemilihan sebelumnya dibawah dari 85% (Wawancara dengan Ketua KPUD, Irwan Abbas, 20 November 2019) dibandingkan pemilihan bupati sebelumnya 79,9% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 70,2% ([www.infopemilu.kpu.go.id](http://www.infopemilu.kpu.go.id), diakses 27 November 2019, jam 21.00 WIT). Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa KPU Kabupaten Pulau Morotai cukup efektif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat..

### **Faktor yang mempengaruhi Peran Komisi Pemilihan Umum**

Menurut Hidayansyah, dkk, banyak faktor yang membuat partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan bisa meningkat dan terkadang juga bisa menurun, tanpa terkecuali pemilihan presiden dan wakil presiden. Faktor masyarakat tidak ikut dalam pemilihan bisa jadi kurangnya informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena memilih Golput atau Apatis terhadap pemilihan karena semakin berkurangnya tingkat kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya. Dalam suatu masyarakat terkadang usaha meningkatkan tingkat pemilih bisa dilakukan dengan berbagai cara dan tidak jauh dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya (Hidayansyah, dkk, 2018: 192-193).

Dari hasil penelitian, ditemukan faktor pendukung adalah adanya kerjasama penyelenggara dari Bawaslu, KPU dan adhoc tingkat bawa untuk suksesi pemilu. Selain itu, adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda dan masyarakat untuk suksesi pemilu yang damai, lancar, damai dan transparansi sesuai dengan undang-undang (Wawancara dengan Kasubag, Emy Mustafa, 6 Januari 2020).

Sedangkan faktor penghambat adalah adanya kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat. Setiap kelompok memiliki keinginan kandidatnya yang terpilih sehingga menimbulkan konflik. Selain itu ada juga kecurangan ditingkat bawa, tapi KPU segera menyelesaikan sesuai amanat undang-undang (Wawancara dengan Kasubag, Emy Mustafa, 6 Januari 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data dan temuan penelitian serta pembahasan tentang peran KPU Pulau Morotai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 (Studi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 (studi pada pemilihan presiden dan wakil presiden), peneliti menemukan ada dua model sosialisasi yang digunakan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Tujuan dari sosialisasi itu adalah pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Adapun aspek yang disosialisasikan adalah manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Ada sepuluh basis yang dikategori sebagai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu. Sembilan basis dilakukan melalui sosialisasi langsung dan satu basis dilakukan melalui sosialisasi tidak langsung. Adapun sepuluh tersebut adalah (1) basis keluarga, (2) basis pemilih pemula, (3) basis pemilih muda, (4) basis pemilih perempuan, (5) basis pemilih disabilitas, (6) basis pemilih kebutuhan khusus, (7) basis pemilih marginal, (8) basis komunitas, (9) basis keagamaan, dan (10) basis warganet. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui dua cara yaitu melalui alat peraga dan media massa.
2. Pada tingkat partisipasi pemilih masyarakat morotai pada pemilu serentak (studi pemilihan presiden dan wakil presiden), peneliti menemukan bahwa tingginya partisipasi pemilu meningkat. hal ini terbukti pada Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Pulau Morotai tingkat partisipasi masyarakat meningkat 87,6% dari pemilihan sebelumnya dibawah dari 85% dibandingkan pemilihan bupati sebelumnya 79,9% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 70,2%.
3. Pada faktor pendukung dan penghambat peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 (studi pada pemilihan presiden dan wakil presiden), peneliti menemukan pada faktor pendukung adalah adanya kerjasama antar Bawaslu, KPU dan adhock tingkat bawa dalam suksesi pemilu sesuai amanah undang-undang. Selain itu, ada juga kerjasama antar KPU dan Pemerintah Daerah, Forkompimda. Kemudian pada faktor penghambat adalah adanya kepentingan sehingga menimbulkan konflik dan kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mariam, 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Efriza, 2012. *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Jakarta.
- Fadjar, Mukthie, 2011. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Firmanzah, (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Jakarta, YOI.

- Ghafar, Affan, (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hidayansyah, Muhammad, dkk, 2018. *Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang*, Malang, Jurnal Civic Hukum.
- Hutami, Gartiria, 2011. *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peraan terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, Universitas Diponegoro, Jurnal.
- Prihatmoko, J, Joko, 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Semarang.
- Putra, Fernanda, Orlando, 2015. *Peranan KPUD Dalam Penyelenggara Pemilihan Walikota di Kota Surakarta Tahun 2015*, Yogyakarta, SKRIPSI.
- Riduwan, (2005). *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung, Alva Beta.
- Sanit, Arbi, 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sparringa, Daniel, (2006). *Demokrasi, Sejarah Praktik dan Dinamika Pemikiran*, Malang, Averoes Press.
- Soebagio, 2008. *Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Tangerang, Universitas Islam Syech Yusuf.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, (2007). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Kencana, Inu, (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Rafika Aditama.
- Winarno, Budi, (2007). *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta, Media Pressindo.